

Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Juwiring

Rendi Saputra^{*}, Darmanto, Suhesti Ningsih

Institut Teknologi Bisnis – AAS Indonesia

^{*})Korespondensi (e-mail: rendiisaputra089@gmail.com)

Abstract

This study aimed to determine the effect of accountability, transparency, and the role of village officials together and individually on the management of village revenue and expenditure budget in Juwiring District, Klaten Regency. The population used in the study was employees who worked in 19 village offices throughout Juwiring District, Klaten Regency. The research samples were 95 respondents. Withdrawal of samples in this study using purposive sampling techniques. The data analysis method used in this study is multiple linear regression. The test results show that accountability, transparency, and the village apparatus's role simultaneously affect the Village Budget's management (APBDes). Accountability and transparency significantly positively affect managing the Village Budget (APBDes). At the same time, the role of the village apparatus has no significant effect on managing the Village Budget and Expenditure Budget (APBDes) in the Juwiring District, Klaten Regency.

Keywords: Accountability, Transparency, Role of village apparatus, APBDes

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan peran perangkat desa secara bersama-sama dan individual terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai yang bekerja di 19 kantor desa se-Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Sampel penelitian sebanyak 95 responden. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa APBDes

How to cite: Saputra, R., Darmanto, D., & Ningsih, S. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Juwiring. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(2), 86-98. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i2.438>

1. Pendahuluan

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Kebijakan alokasi anggaran yang besar memiliki konsekuensi terhadap

pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel. Mengingat dana yang di terima oleh desa jumlahnya cukup besar dan semakin meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa.

Menurut Faradhiba (2018:14) Desa adalah instansi sosial yang memiliki kedudukan sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga bebas dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengasas kuat dan relatif bebas dari campurtangan kekuasaan diluar lembaga. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terkandung tiga pola otonomi. Pertama, kedaulatan provinsi sebagai kedaulatan terbatas. Kedua, kedaulatan kabupaten/kota sebagai kedaulatan luas. Ketiga, kedaulatan desa adalah kedaulatan yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah begitu juga sebaliknya pemerintah berkewajiban menghargai kedaulatan asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Solekhan, 2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Salah satu tugas aparatur desa yaitu untuk mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Fajri et al., 2015). Hendri et al (2016) dan Kumalasari (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Penelitian Kumalasari (2016) membuktikan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan dan kompetensi masih memiliki kendala sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa yang masih kurang berpengalaman dan masih membutuhkan pendampingan dari aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Perangkat desa merupakan salah satu organ penting dalam pemerintahan desa. Kedudukan perangkat desa ada untuk membantu tugas kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Dengan berperannya perangkat desa dalam pengelolaan dana desa maka kualitas dari pengelolaan dana desa itu sendiri akan

menjadi lebih akuntabel dan transparan. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis (Indrianasari, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Irma (2015), Setiawan dan Yuliani (2017) menyimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Juwiring adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Juwiring terletak di bagian timur laut Kabupaten Klaten. Di sektor ekonomi, Juwiring memiliki 2 pasar. Pasar Juwiring di Desa Bulurejo dan Pasar Tanjung di Desa Tanjung. Di sektor ekonomi Juwiring masih mengandalkan agraria dan didukung oleh kerajinan mebel dan ukiran Serenan serta berdirinya beberapa pabrik garment yang berbasis home industry maupun PT berada dikecamatan Juwiring hal itu berdampak positif bagi pendapatan desa kecamatan Juwiring. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Banyak faktor yang mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi perangkat desa. Hasil penelitian Kusumaningrum, Suharno, dan Widarno (2019) menunjukkan bahwa Akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

H1 : Akuntabilitas, tranparansi, dan peran perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh dalam pengelolaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Indrianasari, 2017). Sangki, Gosal, dan Kairupan, (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan program APBDes di Desa Tandu tidak berpengaruh atau tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan akuntabilitas pada tahap ini pertanggungjawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Dari penelitian terdahulu tersebut maka setiap desa harus melakukan tugasnya tentang pelaporan APBDes yaitu melakukan laporan pertanggungjawaban disetiap tahap kegiatan yang sudah terealisasi. Hasil penelitian Indrianasari (2017) menunjukkan ada pengaruh positif dari akuntabilitas, dalam pengelolaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

H2: Akuntabilitas berpengaruh dalam pengelolaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan faktor-faktor yang sifatnya material secara bertahap kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Hanifah & Praptoyo, 2015). Hasil penelitian Kusumaningrum, et al (2019) menunjukkan ada pengaruh positif dari transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

H3: Transparansi berpengaruh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peran perangkat desa salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa di bawah naungan Kepala Desa (Gunawan, 2013). Peran perangkat desa berpengaruh positif dalam pengelolaan APBDes maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa. Hasil penelitian Kusumaningrum, et al (2019) menunjukkan ada pengaruh positif dari peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

H4: Peran perangkat desa berpengaruh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang bekerja di 19 kantor desa se-Kecamatan Juwiring Kecamatan Klaten. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan kriteria: Penentuan kriteria responden pihak yang terkait berhubungan secara langsung dengan pengelolaan keuangan di tiap-tiap Desa antara lain antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Urusan Umum. Jumlah masing-masing desa 5 sampel sehingga total sampel sebanyak 95 orang. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Untuk Variabel independet dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan peran perangkat desa.

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018) validitas yaitu kecermatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak sahnya suatu kuesioner. Syarat uji validitas yaitu masing-masing item harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat

signifikansi 5% atau α (0.05). Kriteria pengujian adalah: jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total dan dapat dikatakan valid begitu juga sebaliknya.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu indikator yang menunjukkan seberapa jauh hasil suatu penelitian pengukuran dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Sebuah variabel dapat dikatakan reliabel jika dapat memenuhi kriteria *Cronbach Alpha* (α) $> 0,6$ (60%).

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda, dimana dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Adapun model persamaan yang digunakan adalah menurut Sugiyono (2018) sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y : Kinerja Pemerintah Daerah
- X1 : Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- X2 : Pengelolaan Keuangan Daerah
- X3 : Komitmen Organisasi

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali (2016: 154). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dianggap berdistribusi normal.

Uji Multikoloniaritas Menurut Ghozali (2011: 105), bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat salah satunya dari nilai tolerance dan lawannya dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa terjadi karena observasi berurutan di sepanjang waktu terjadi keterkaitan satu sama lainnya. Persamaan regresi yang baik seharusnya terbebas dari autokolerasi. Jika antar variabel tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak (Ghozali, 2016). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan model Durbin Watson (DW-test). Apabila nilai Durbin Watson statistik (hitung) melebihi batas atas Durbin Watson tabel, maka dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam regresi.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Pada penelitian ini penulis menggunakan nilai Adjusted R Square karena nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2011: 105).

Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model untuk mengetahui pengaruh simultan variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan peran perangkat desa (X_3) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel, jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Ghazali, 2011: 97).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2011: 97). Dasar pengambilan keputusan saat melakukan uji statistik t adalah jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah Responden | % |
|---------------|------------------|---------|
| Laki-laki | 64 | 67,37% |
| Perempuan | 31 | 32,63% |
| Total | 95 | 100,00% |

| Pendidikan | | |
|--------------|----|---------|
| SLTP | 0 | 0,00% |
| SLTA | 23 | 24,21% |
| Diploma | 24 | 25,26% |
| Sarjana | 48 | 50,53% |
| Pascasarjana | 0 | 0,00% |
| Total | 95 | 100,00% |
| Masa Kerja | | |
| < 5 tahun | 6 | 6,32% |
| 5-10 tahun | 54 | 56,84% |
| > 10 tahun | 35 | 36,84% |
| Total | 95 | 100,00% |

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas data diketahui bahwa seluruh item pertanyaan kuesioner variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa dan pengelolaan APBDes, didapatkan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai Sig. $< 0,05$ sehingga dapat dimaknai seluruh item pertanyaan valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Uji Reabilitas

Semua instrumen variabel penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian adalah reliabel.

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

| No | Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----|---------------------------|------------------|------------|
| 1 | Pengelolaan APBDes (Y) | 0,774 | Reliabel |
| 2 | Akuntabilitas (X1) | 0,762 | Reliabel |
| 3 | Transparansi (X2) | 0,765 | Reliabel |
| 4 | Peran Perangkat Desa (X3) | 0,760 | Reliabel |

Analisis Linier Berganda

Tabel 3. Hasil regresi linear berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| | B | Std. Error |
| (Constant) | 11,493 | 4,155 |
| Akuntabilitas | 0,522 | 0,089 |
| Transparansi | 0,306 | 0,097 |
| Peran Perangkat Desa | -0,095 | 0,081 |

Dari hasil analisis regresi linier berganda, maka diperoleh model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 11,493 + 0,522X_1 + 0,306X_2 - 0,095X_3$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas nilai signifikansi pada One-Sample Kolmogorov-Smirnov nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,355 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,355 > 0,05$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusikan normal.

Tabel 4. Uji normalitas paa residual

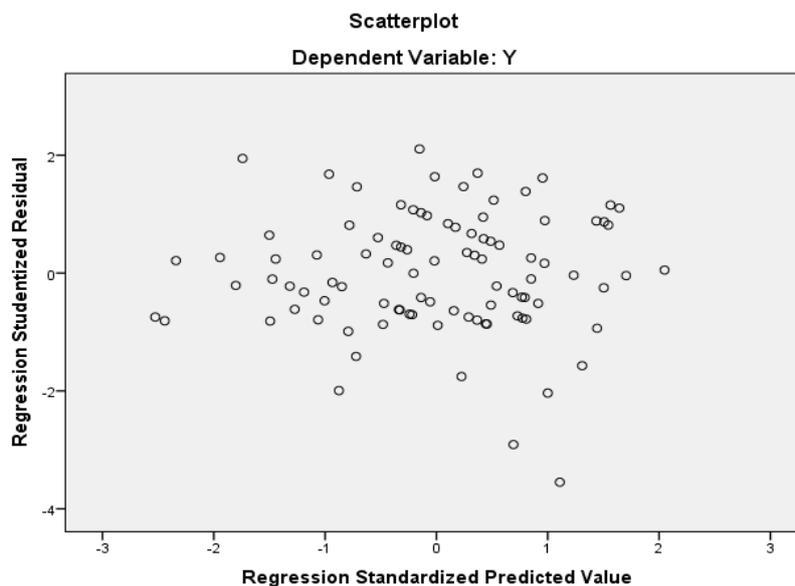
| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 95 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,78498418 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,095 |
| | Positive | 0,035 |
| | Negative | -0,095 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 0,928 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,355 |

Uji Multikolinieritas hasil penghitungan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Sementara itu, nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

| Model | Collinearity Statistics | | Keterangan |
|---------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| Akuntabilitas (X1) | 0,932 | 1,073 | Tidak terjadi multikolinieritas |
| Transparansi (X2) | 0,935 | 1,069 | Tidak terjadi multikolinieritas |
| Peran Perangkat Desa (X3) | 0,954 | 1,048 | Tidak terjadi multikolinieritas |

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan hasil Scatter Plot, pancaran data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka dinyatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas.



Gambar 1. Uji heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi Durbin Watson sebesar 1,868. Jumlah sampel sebanyak 95, dan variabel yang digunakan sebanyak 4 variabel maka diperoleh nilai batas bawah (DL) sebesar 1,5795 nilai batas atas (DU) sebesar 1,7546. Berdasarkan hal tersebut, terlihat nilai durbin watson statistik 1,868 masih lebih besar dari 1,7546 atau

$(DU) < (DW) < (4-DL)$ yaitu $1,7546 < 1,868 < 2,4205$. Dengan demikian dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 6. Uji Autokorelasi Durbin Watson

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 0,61 1 ^a | 0,373 | 0,353 | 2,83052 | 1,868 |

Uji Koefisien Determinasi (adjusted R²)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 6, nilai koefisien R² hitung (Koefisien Determinasi), yakni sebesar 0,353 (35,3%). Nilai ini menunjukkan efektivitas regresi yang diperoleh dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F

Tabel 7. Hasil uji F

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| Regression | 434,460 | 3 | 144,820 | 18,076 | 0,000 |
| Residual | 729,077 | 91 | 8,012 | | |
| Total | 1163,537 | 94 | | | |

Berdasarkan uji analisis regresi simultan yang terlihat pada Tabel bahwa $F_{hitung} = 18,076$ dan $F_{tabel} = 2,70$ jadi F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($18,076 > 2,70$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh nyata terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Uji hipotesis (Uji t)

Tabel 8. Hasil uji t

| Model | Coefficients | Std. Error | t | Sig. | Keterangan |
|----------------------|--------------|------------|--------|-------|-------------------|
| Akuntabilitas | 0,522 | 0,089 | 5,883 | 0,000 | Berpengaruh |
| Transparansi | 0,306 | 0,097 | 3,158 | 0,002 | Berpengaruh |
| Peran Perangkat Desa | -0,095 | 0,081 | -1,167 | 0,246 | Tidak berpengaruh |

4.2. Pembahasan

Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa Secara dan Pengelolaan APBDes

Berdasarkan uji analisis regresi simultan didapatkan bahwa $F_{hitung} = 18,076 > F_{tabel} = 2,70$ maka variabel independen yang terdiri dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh nyata terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besarnya pengaruh variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebesar 35,3%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kusumaningrum, et al (2019) yang

menyatakan akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan dana desa memerlukan akuntabilitas yang menjadi indikator penting dalam pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes). Mardiasmo (2018: 27) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Artinya semakin baik komitmen seseorang aparatur desa maka semakin baik pula kinerjanya dalam mengelola dana desa (Dewi, Ikbal, dan Fadli, 2019).

Akuntabilitas dan Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t_{hitung} untuk variable Akuntabilitas sebesar $5,883 > t_{tabel} = 1,6617$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena signifikansi kurang dari 0,05; maka variable Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada taraf $\alpha=5\%$. Hasil penelitian ini sesuai dengan Penelitian Kumalasari (2016) dan Sukmawati dan Nurfitriani (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu penelitian ini bertentangan dengan Agustiana (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan pada unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang diberi pertanggungjawaban. Semakin baik suatu sistem akuntansi yang memberikan informasi yang handal, akurat, pertanggungjawaban, dan tepat waktu maka akuntabilitasnya akan semakin baik. Akuntabilitas pada pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang berkenaan dengan pembangunan pemerintahan desa (Lestari, Atmadja & Adiputra, 2014).

Transparansi dan Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t_{hitung} untuk variable Transparansi sebesar $3,158 > t_{tabel} = 1,6617$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 karena signifikansi kurang dari 0,05 maka variable Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada taraf

$\alpha=5\%$. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kumalasari (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan Sukmawati^F dan Nurfitriani (2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Tujuan dari diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ialah untuk memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selain terbuka kepada masyarakat, transparansi juga dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Dewi, Ikkal, dan Fadli, 2019).

Peran Perangkat Desa dan Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t_{hitung} untuk variable Peran Perangkat Desa sebesar $-1,167 < t_{tabel} = 1,6617$ nilai signifikansi sebesar 0,246 karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variable Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada taraf $\alpha=5\%$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Yuliani (2017) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Kusumaningrum, et al (2019) dan Nandea (2019) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak adalagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan sepihak. Penelitian ini sesuai dengan teori Agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara principals dan agent dimana kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan terhadap perangkat desa sebagai agen yang ikut berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Setiawan dan Yuliani, 2017).

5. Kesimpulan

Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa memiliki pengaruh nyata terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Adapun secara parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, sehingga hipotesis 2 terbukti kebenarannya. Sementara peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah memberi dukungan serta kepada seluruh civitas akademika Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia yang telah banyak membantu dan mendorong penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Agustiana, V. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu (Studi Pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* Vol. 1 No. 2 (2020).
- Dewi, C.K.; Ikkal A, M.; & Moh. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah* 1(2) (2019) : 57 – 64.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Administrasi Publik*.studentjournal.ub.ac.id.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA*. 7(7): 14-28.
- Ghozali (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Perogram IMB SPSS 19, Edisi Lima*. Semarang: Badan Penerbit Universitas
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8), 1-15.
- Hendri, S., Ardania, N. O. C. A., Rakhmawati, I., & Atikah, S. (2016, October). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah. In *Conference on Management and Behavioral Studies Universitas Tarumanagara, Jakarta* (Vol. 27).
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Add) di kecamatan dolo selatan kabupaten sigi. *Katalogis*, 3(1).
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Kusumaningrum, P. D., Suharno, S., & Widarno, B. (2019). Akuntabilitas, Transparansi Dan Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. *Jurnal*

Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 15(4).

- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., Adiputra, I. M. P. (2014). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 2(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi: Yogyakarta.
- Nandea, F. A. (2019). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Demak). *vol, 8*, 2019-2019.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *Urecol*, 205-210.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Setara.
- Sugiyono, D (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.